

ICASEPS WORKING PAPER No. 65

KELOMPOK TANI DAN PENGEMBANGAN (TRANSFORMASI) KEORGANISASIAN EKONOMI PEDESAAN

Kasus Pengamatan pada Kelompok-kelompok Tani
di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Tri Pranadji dan Endang L. Hastuti

Oktober 2004



**Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
(Indonesian Center for Agricultural Socio Economic and Policy Studies)
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian**

KELOMPOK TANI DAN PENGEMBANGAN (TRANSFORMASI) KEORGANISASIAN EKONOMI PEDESAAN

Kasus Pengamatan pada Kelompok-kelompok Tani di Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Tri Pranadji dan Endang L Hastuti

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. Ahmad Yani 70 Bogor 16161

ABSTRAK

Meskipun wilayah Kabupaten Badung di Provinsi Bali sebagai salah satu daerah pengembangan wisata, namun perkembangan kepariwisataan tani belum terlalu banyak bisa membantu kesulitan ekonomi masyarakat pedesaan. Kebijakan pengembangan perekonomian pedesaan yang dijalankan pemerintah hingga saat ini masih belum didukung pemahaman yang mendalam pada aspek kelembagaan dan keorganisasian secara sehat. Tujuan penulisan makalah adalah dalam rangka membuat gambaran bahwa kelompok tani jika ditangani dengan baik dapat dijadikan basis pengembangan keorganisasian ekonomi pedesaan. Bahasan makalah merupakan hasil pengamatan lapangan pada dua kelompok tani yang masih hidup di Kabupaten Badung Provinsi Bali. Hasil penelitian menemukan kenyataan bahwa kegiatan kelompok tani menjadi bagian kepanjangan lembaga adat. Pembentukan kelompok yang terlalu mementingkan pada basis produksi atau komoditi dan kurang memperhatikan khasanah budaya, tidak menghasilkan kinerja dan perkembangan daya saing. Orientasi ekonomi, pilihan komoditi, penguasaan teknologi dan pengetahuan teknik produksi merupakan aspek penting dalam pengembangan daya saing kelompok. Sumberdaya lahan, budaya setempat, kekayaan pengetahuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus dinilai sebagai asset strategis masyarakat Bali.

Kata Kunci; kelompok, pengembangan, organisasi, kelembagaan.

PENDAHULUAN

Ekonomi pedesaan hingga dewasa ini belum menunjukkan tanda-tanda bisa berkembang sehat. Suatu kegiatan ekonomi akan sulit berkembang, dalam arti memiliki daya saing tinggi, tanpa adanya dukungan keorganisasian yang memiliki kinerja yang bisa diandalkan. Sebagai gambaran, sistem perekonomian ("komunal") masyarakat Jepang menunjukkan kinerjanya yang unggul karena dilandaskan pada pengorganisasian pelaku-pelaku ekonominya yang terus menerus diperbaharui ke arah terbentuknya sistem distribusi insentif yang relatif merata ke seluruh elemen pelaku ekonominya.

Jika menginginkan perekonomian pedesaan di kemudian hari menjadi soko guru perekonomian nasional, membangun basis keorganisasian perekonomian pedesaan yang kuat saat ini dipandang sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa membangun perekonomian nasional, dengan

mengandalkan sistem organisasi konglomerasi dan pemusatan pada penguasaan kapital yang terlalu besar pada sejumlah kecil pelaku ekonomi, ternyata tidak menghasilkan kinerja perekonomian nasional yang kuat. Kebijakan pengembangan perekonomian pedesaan yang dijalankan pemerintah hingga saat ini masih belum didukung pemahaman yang mendalam pada aspek kelembagaan dan keorganisasiannya secara sehat.

Dilandaskan pada pemikiran bahwa aspek sosio-budaya sangat menentukan perkembangan masyarakat, maka secara teoritis ("sosiologis") kelompok komunal atau kelompok tani seharusnya dapat digunakan sebagai basis pengembangan keorganisasian perekonomian pedesaan. Bagi penghamba mashab pertumbuhan ekonomi ('growth maniac'), pemikiran yang menempatkan kelompok tani sebagai kekuatan ekonomi cenderung dipandang sebagai pemikiran utopia-populis. Sudah barang tentu hal ini tidak dapat begitu saja disalahkan, lebih-lebih jika kelompok tani tersebut hanya ditempatkan sebagai obyek dari jaringan sistem kerja perencanaan terpusat, centrally planed economies (Kozminski, 1990). Namun dari sudut pandang (mashab) yang mementingkan keadilan sebagai pendekatan dan sekaligus tujuan pembangunan, maka menempatkan kelompok tani sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi berbasis "kerakyatan" justru harus dipandang sebagai cara yang lebih masuk akal.

Pengembangan kelompok tani idealnya bisa dijadikan titik awal membangun jaringan keorganisasian pedesaan yang kuat. Hanya sayangnya, hingga sekarang masih berkembang anggapan bahwa kelompok tani yang dibentuk oleh pemerintah dua-tiga dekade lalu tidak memiliki kemandirian untuk berkembang sehat. Sebagian besar kelompok tani yang banyak dikenal selama ini adalah yang dibentuk dan mendapat "restu" pemerintah. Kehidupan kelompok tani tadi. Secara fisik memang tampak ada, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, apalagi berkembang secara mandiri.

Tujuan penulisan makalah ini adalah dalam rangka membuat gambaran bahwa kelompok tani, jika ditangani dengan baik, ia akan bisa dijadikan basis pengembangan keorganisasian kegiatan ekonomi di pedesaan. Cara memandang kelompok tani tadi hendaknya jangan hanya dilihat dari aspek legal formalnya atau dari segi keberadaannya secara fisik (material), namun perlu bahkan lebih penting dilihat dari khasanah budaya non-material setempat yang menghidupinya. Dalam makalah ini dikemukakan tentang pentingnya melihat kelompok tani dan keutuhan (inti) budaya,

dilihat dari dua sisi sekaligus yaitu budaya material dan non-materialnya (Anonimous, 2000 dan Soedjatmoko, 1983).

Hipotesa pengarah yang digunakan dalam analisis adalah: "jika dalam kelompok tani aspek keorganisasian daya saingnya (di bidang ekonomi) tidak dapat berkembang, diperkirakan kelompok tani tersebut akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup". Selanjutnya juga bisa dikemukakan bahwa jika suatu kegiatan pembinaan keorganisasian kelompok tani, terutama oleh aparat pemerintah, tidak diarahkan untuk meningkatkan daya saing di bidang ekonomi, maka kegiatan pembinaan terhadap kelompok tani dapat dikatakan gagal. Dalam tulisan ini, hipotesa ini akan diujikan pada dua kelompok tani contoh yang ada di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Bahasan makalah ini merupakan hasil dari kegiatan pengamatan lapangan yang dipusatkan pada dua kelompok tani yang masih hidup, yaitu: Kelompok Tani Sari Segare (KSS), mewakili kelompok tani relatif kurang maju, dan Kelompok Tani Pande Segune (KPS), mewakili kelompok yang relatif maju. Jika dari pengamatan dan penganalisaan di lapangan diperoleh gambaran bahwa kinerja ekonomi pengorganisasian suatu kelompok tani bisa menunjukkan keunggulannya secara signifikan, maka daya saing yang ditunjukkan oleh kelompok tani tersebut diperkirakan akan lebih tinggi.

Dapat dikemukakan bahwa kedua kelompok tani yang diamati ini mempunyai beberapa perbedaan yang cukup signifikan, antara lain dilihat dari agroekosistem yang mendukungnya, produk (komoditi dan jasa pelayanan) andalan yang dikembangkan, sejarah dan awal pembentukannya, dan tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah. Dengan perbedaan itu diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang secara signifikan membentuk daya saing kelompok tani di bidang (kinerja) ekonomi. Ada beberapa kelompok tani lain, seperti Kelompok Subak Aya, juga diamati untuk memperkaya analisis.

KELOMPOK TANI DAN KEMAJUAN EKONOMI

Kelompok Tani di Tengah Jepitan Ekonomi Kota

Kedua kelompok tani yang diamati KSS dan KPS beranggotakan petani yang sebagian besar berasal dari penduduk pedesaan setempat dan sekitarnya. Hingga saat ini ketergantungan penduduk pedesaan setempat terhadap sumberdaya pertanian masih relatif tinggi, terutama pada KPS dan kelompok Subak (Aya). Walaupun wilayah Kabupaten Badung terutama di sekitar KSS berada, sebagai salah satu daerah

pengembangan wisata bertaraf internasional yang potensial, namun manfaat dari perkembangan kepariwisataan tadi belum terlalu banyak bisa membantu kesulitan ekonomi masyarakat pedesaan setempat. Kegiatan (usaha) pertanian masih merupakan andalan perekonomian sebagian besar pelaku ekonomi individu, rumah tangga dan masyarakat pedesaan setempat.

Dikaitkan dengan kecepatan dan skop perkembangan (peradaban material) wilayah Provinsi Bali (terutama akibat perkembangan industri dan jasa turisme), khususnya di Kabupaten Badung, hal itu tampaknya tidak mempunyai implikasi yang erat dan langsung dengan perkembangan daya saing kelompok tani setempat. Perkembangan kelompok tani ternyata belum mencerminkan perkembangan masyarakat pedesaan yang masih berada dalam peradaban transisi ke arah masyarakat industrial. Masyarakat pedesaan Bali masih kental mencirikan tradisi kehidupan agraris setengah tradisional dan setengah modern. Keadaan seperti ini mencirikan masyarakat yang berada di pertengahan jalan simpang, antara (mencirikan kehidupan) agraris-tradisional dan industrial-modern. Dapat dikemukakan bahwa budaya perekonomian keseluruhan masyarakat Bali hingga saat ini seakan-akan masih terbelah menjadi dua bagian, yaitu belahan kehidupan masyarakat pedesaan-pertanian-tradisional di satu sisi, dan belahan kehidupan masyarakat perkotaan-industri dan jasa modern di sisi lain.

Kehidupan masyarakat pedesaan Bali yang hingga dewasa ini masih bekerja di bidang pertanian, tidak terlalu banyak bisa memperoleh manfaat langsung dari perkembangan perekonomian perkotaan yang digerakkan oleh industri, perdagangan, dan jasa turisme. Terlebih lagi setelah tragedi "Bom Bali". Interaksi masyarakat pedesaan Bali dengan kehidupan dan dinamika perekonomian modern (perkotaan-industri-jasa) masih terbatas pada penjaja jasa tenaga kerja atau buruh kasar berketerampilan ("skill") seadanya. Dilihat dari pemenuhan tenaga kerja berketerampilan tinggi, keberadaan mereka ini secara ekonomi tidak begitu diperhitungkan. Dapat dikatakan bahwa kehadiran mereka ini tidak mempunyai kontribusi atau "saham" yang signifikan terhadap kemajuan kehidupan perekonomian modern di wilayah Bali.

Belajar dari pengalaman "Bom Bali" kestabilan politik dan keamanan harus dipandang sebagai salah satu persyaratan atau modal penting perkembangan kehidupan perekonomian (modern) suatu wilayah. Dengan modal tadi, sebagaimana secara "semu" dicobakan pada masa Orde Baru di Indonesia dan pada abad 17-18 di Eropa (a hundred years peace; Polanyi, 1957), dalam rangka menjaga dan menjamin rasionalitas investasi yang datang dari luar, maka semestinya sebagian besar

masyarakat pedesaan Bali berhak memperoleh kembalian jasa ekonomi yang relatif besar dari perekonomian perkotaan. Suasana nyaman dan aman harus dipandang sebagai aset budaya masyarakat pedesaan Bali yang bernilai ekonomi.

Tingkat pendidikan dan keterampilan formal masyarakat pedesaan Bali umumnya masih relatif rendah, sebagian besar baru tamatan (atau bahkan masih banyak yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD)). Tambahan pendidikan keterampilan di luar sekolah, melalui proses magang kerja (misalnya dalam kasus mengukir kayu), menjadi andalan. Hanya saja, umumnya hal itu belum mampu memacu secara signifikan kontribusi pelaku ekonomi pedesaan dalam perekonomian perkotaan yang dikendalikan oleh turisme dan industri kecil. Tanpa pendidikan dan keterampilan tambahan (di luar sekolah) yang memadai, terutama yang relevan untuk mendukung kegiatan perekonomian modern, maka akan sulit bagi masyarakat pedesaan Bali dalam waktu singkat dapat ikut menikmati kue kemajuan ekonomi modern yang berkembang di perkotaan.

Keadaan perekonomian masyarakat pedesaan di Bali yang berhasil diamati sebenarnya tidak terlalu menunjukkan gambaran yang menyedihkan. Namun jika dibanding dengan tingkat kemajuan yang dicapai oleh masyarakat perkotaannya, maka kondisi perekonomian masyarakat pedesaannya dapat dikatakan masih relatif menyedihkan. Tampaknya pemerintah setempat, dan lebih-lebih pemerintah pusat belum menemukan atau membuat suatu resep khusus yang bisa mengintegrasikan dengan baik antara kemajuan perekonomian di perkotaan dan pedesaan. Bagaimanapun juga masih terlihat dengan jelas bahwa ada semacam gejala ketidakberdayaan pemerintah setempat untuk memajukan perekonomian pertanian di pedesaan, relatif dibandingkan dengan kemajuan perekonomian yang dicapai oleh masyarakat perkotaannya.

Keberadaan kelompok tani tampaknya belum bisa menjadi faktor penguat integrasi antara kemajuan perekonomian perkotaan, yang digerakkan oleh industri dan jasa, dengan kemajuan perekonomian pedesaan, yang digerakkan oleh pertanian dan tenaga kerja berketerampilan rendah. Dalam banyak kasus, lahan-lahan pertanian dengan relatif sangat cepat telah beralih fungsi menjadi lahan untuk kegiatan industri dan jasa; sementara itu kecepatan pergeseran lapangan kerja atau mata pencaharian penduduk desa setempat (dari pertanian ke non-pertanian) masih relatif sangat lambat. Bahkan terkesan kuat bahwa dilihat dari segi pelayanan publik, sektor perekonomian industri di perkotaan cenderung lebih dimanjakan, dan sebaliknya sektor pertanian dan

pedesaan cenderung dikebelakangkan ("anak tin"). Perekonomian pedesaan, yang terjebak dalam kerangka "modernisasi" (Pranadji, 1998), menjadi seperti kehidupan anak balita yang jauh dari standar gizi normal; atau mengalami kurang kalori, protein dan vitamin sekaligus.

Strategi memajukan ekonomi Bali terlihat belum sebangun dengan memajukan perekonomian pedesaannya. Tidak terlihat ada strategi khusus untuk pemberdayaan perekonomian pedesaan yang menitik beratkan pada penguatan keorganisasian petaninya. Kelompok tani belum mendapat sentuhan tangan profesional yang memiliki pengetahuan lokal cnggi dan sekaligus menguasai visi perekonomian masa depan yang kuat. Ada semacam asumsi "terselubung" yang dianut oleh para elit politik dan penyelenggara pembangunan di pusat maupun daerah bahwa "Jika ingin maju, orang desa itu sendiri yang harus mampu dan memiliki daya saing yang kuat tanpa sentuhan kebijakan pemerintah".

Dari informasi yang diterima dari media elektronik (radio dan televisi) dan media cetak (surat kabar), banyak tokoh dan bahkan petani di desa beranggapan bahwa para elit pemerintah tidak banyak yang peduli dengan nasib ekonomi orang desa. Para petani merasa mereka telah "dibohongi" oleh tokoh partai politik dalam kampanye pemilu beberapa tahun lalu. Para tokoh partai politik dalam kenyataannya tidak mewakili masyarakat petani atau masyarakat pedesaan. Di era otonomi seperti sekarang, para elit politik kabupaten dan kota lebih sibuk memikirkan kepentingannya sendiri dari pada memajukan perekonomian masyarakat pedesaan. Tidak ada saluran kelembagaan yang bisa menjembatani "tuntutan petani" dengan para anggota DPRD setempat. Dalam situasi demikian, keberadaan kelompok tani sebagai organisasi ekonomi akan sangat sulit dfriarkan bisa menjalankan "tugas"-nya sebagai lembaga perekonomian yang strategis dan berdaya saing tinggi di pedesaan.

Prasarana dan Kelembagaan Ekonomi

Prasarana yang menonjol berkembang di pedesaan adalah sudah adanya jaringan jalan raya beraspal. Hanya saja, jaringan jalan ke tempat usaha pertanian (farm road) dijalankan kondisinya masih belum sebaik jalan antar desa. Dilihat dari fungsinya, jaringan jalan yang telah dibangun memang memberikan manfaat besar bagi perkembangan perekonomian pedesaan. Perkembangan aktivitas kelompok tani juga diuntungkan oleh adanya jaringan jalan ini. Yang paling mudah dilihat adalah proses pelaku ekonomi atau masyarakat pedesaan dalam memperoleh sarana produksi,

kebutuhan rumah tangga petani dan menjual produk pertanian ke pasar menjadi relatif semakin lancar. Namun jika kemudian ingin dilihat perimbangan antara nilai produk yang dialirkan dari desa ke kota dibanding yang dari kota ke desa, maka fungsi jalan mengandung unsur yang berbahaya bagi perekonomian pedesaan. Jalan tersebut menjadi berfungsi juga sebagai pemercepat proses terjadinya ketimpangan antara kemajuan perekonomian kota dan desa.

Kemajuan di bidang prasarana lain yang cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan adalah bangunan jembatan, sekolah, terminal angkutan umum dan kompleks pasar atau pertokoan. Tidak dipungkiri bahwa keberadaan prasarana tersebut dirasakan sangat membantu mobilitas masyarakat pertanian dan pedesaan. Mereka merasakan bisa lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di balik itu terdapat juga gejala yang mengawatirkan. Keberadaan prasarana tadi juga mempunyai andil memudahkan masyarakat pedesaan melepaskan aset dan uangnya untuk memenuhi hasrat sesaat mengikuti (atau "terseret", terutama bagi kalangan muda) pola kehidupan perekonomian perkotaan yang serba "wah" untuk ukuran mereka. Padahal pola kehidupan kota itu, disamping belum tentu sesuai untuk kemajuan, juga kurang sesuai untuk ukuran kemampuan masyarakat pedesaan. Kehidupan tadi cenderung tergolong sangat konsumtif.

Di kota kabupaten dan kecamatan cukup banyak dijumpai lembaga pelayanan perkonomian modern, seperti: bank, lembaga asuransi, pegadaian dan koperasi termasuk KUD. Secara umum lembaga-lembaga tadi masih jauh dari jangkauan kemampuan petani, atau masyarakat pedesaan untuk bisa memperoleh manfaatnya secara langsung. Keberadaan lembaga tadi masih semacam "menggantung di langit" (Pranadji et al., 1999), sementara itu kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan yang sangat mendambakan mendapat kemudahan dalam pelayanan kapital tidak mampu meraihnya. Namun demikian, keberadaan lembaga-lembaga tadi tidak dapat dikatakan kurang ada manfaatnya. Umumnya masyarakat desa adat di Bali memiliki semacam "lembaga ekonomi desa", sebagai upaya memanjangkan tangan untuk meraih pelayanan dari lembaga perkonomian modern tadi, yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Peran LPD ini sangat strategis bagi masyarakat pedesaan yang sudah mampu dan mempunyai kegiatan ekonomi yang jelas.

Perlu dikemukakan bahwa pendirian LPD tadi tidak berasal dari pemerintah pusat. Keberadaan LPD sepenuhnya karena inisiatif Pemerintah Daerah Tingkat I, dengan memanfaatkan kekuatan masyarakat desa adat atau Banjar Adat. Di Bali ada

dua jenis pengaturan administrasi desa, yaitu yang didasarkan atas aturan adat dan aturan yang dibuat pemerintah pusat. Biasanya jika keberadaan dan fungsi adat masih menonjol termasuk kepemimpinan adat setempat maka kehidupan perekonomian masyarakat pedesaan lebih kuat diwamai oleh pengaturan adat setempat. Bagi masyarakat petani di pedesaan, fungsi LPD lebih bisa dirasakan dibanding dengan lembaga perkonomian modern, seperti KUD atau BRI Unit tingkat kecamatan. Lembaga Banjar Adat mempunyai peran besar terhadap pengendalian dan pengelolaan LPD ini.

Dari pengamatan atas kedua kelompok tani diperoleh kesan bahwa tekanan kebutuhan terhadap pelayanan jasa keuangan atau permodalan di pedesaan sangat tinggi. Etos kerja masyarakat pedesaan Bali pada umumnya relatif tinggi, dan jarang didapati mereka membiarkan did atau memilih menjadi penganggur karena upah rendah. Bagi masyarakat Bali menganggur merupakan kerendahan diri dan menunjukkan gejala kerendahan kehormatan diri. Salah satu faktor yang menjadi kendala mereka sulit mengoptimalkan sumberdaya tenaga kerja keluarganya adalah kelangkaan keuangan untuk menjalankan aktivitas ekonomi pertanian atau kerajinan rumah tangganya. Pada kedua kelompok tani contoh, kecenderungan untuk menjalankan kegiatan di bidang jasa simpan pinjam sangat menonjol. Kegiatan tersebut umumnya diarahkan untuk melayani kepeiiuan kegiatan ekonomi di luar pertanian, dan jarang sekali untuk tujuan konsumsi. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa sistem pengorganisasian (gabungan) kelompok tani diarahkan menjadi semacam (berbadan usaha) koperasi, yang salah satu kegiatan utamanya adalah untuk melayani kebutuhan permodalan petani.

Gambaran tersebut bisa jadi terkesan janggal atau aneh jika dilihat dari perspektif pengembangan KUD pada masa Orde Bam. Lembaga keuangan yang dikelola secara kelompok atau mengikuti model Banjar Adat hampir sama sekali tidak terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Lembaga ini sepenuhnya tumbuh dari bawah dan dari kekuatan budaya masyarakat pedesaan. Hubungan lembaga tersebut dengan lembaga keuangan formal, seperti perbankan, hampir sepenuhnya berdasar rasionalitas ekonomi modern. Namun hubungan lembaga ini dengan anggota kelompok tani sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan lembaga adat setempat Seseorang yang tidak mampu membayar hutang, terutama disebabkan oleh musibah atau bukan karena tindak kecurangan, akan memperoleh kemudahan dalam pembayaran hutangnya, termasuk (jika mungkin, walau ini jarang terjadi) pembebasan hutang. Sistem "jaminan" yang digunakan untuk peminjaman lebih

didasarkan pada kepercayaan diri dan aturan adat setempat yang diekspresikan secara eksplisit, dalam bentuk awig-awig dan pararem. Yang hampir pasti sistem peminjaman ini tidak membutuhkan jaminan atau agunan kolateral. Justru sistem jaminan kolateral inilah yang secara sadar ingin dipatahkan oleh lembaga keuangan pedesaan "model Banjar Adat" ini.

Kelompok Tani dan Transformasi Ekonomi Pedesaan

Dari gambaran yang diamati di lapangan diperoleh kesan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pedesaan Bali untuk menghargai kehidupan bersama ("kolektif") masih relatif tinggi. Kesenjangan ekonomi yang ekstrim di pedesaan tidak terlihat jelas. Budaya kolektif masyarakat setempat cukup mampu me-"nyembunyi"-kan kemungkinan terjadinya polarisasi kehidupan ekonomi yang tajam di pedesaan. Ada semacam tanggung jawab (collective responsibility) dan keinginan bersama agar dalam sistem sosial yang relatif kecil terutama hingga tingkat pedesaan, tidak terdapat golongan masyarakat yang tersisih secara ekonomi. Dalam hal ini kekuatan adat yang menjunjung tinggi kehidupan solidaristik, sangat besar perannya dalam menyembunyikan gejala disharmoni dan ketegangan sosial yang serius; terutama yang diakibatkan oleh kesenjangan atau ketidakberdayaan ekonomi setempat.

Semangat kerjasama atau gotong royong di masyarakat pedesaan ternyata tidak begitu saja luntur dengan masuknya peradaban ekonomi modern (uang dan pasar). Walaupun terasa relatif lambat, gejala transformasi ekonomi di pedesaan telah mulai dirasakan. Faktor pendorong transformasi yang berasal dari luar, sebagian besar adalah komponen budaya material, yaitu ekonomi pasar dan uang, teknologi (produksi bahan mentah), dan transportasi. Perekonomian yang dipacu oleh turisme sangat besar dalam mempercepat proses transformasi ekonomi pedesaan di Bali. Gambaran ini tampaknya sejalan pendapat Hayami dan Kikuchi (1987) bahwa peranan kelembagaan setempat sangat besar dalam membendung dampak negatif ekonomi pasar.

Faktor transformasi ekonomi lain, terutama yang tergolong komponen budaya non-material seperti kompetensi SDM, keorganisasian, manajemen usaha, dan struktur sosial, secara sistematis tampaknya belum banyak mengalami sentuhan kemajuan yang berarti. Transformasi perekonomian pedesaan sebagian besar masih digerakkan oleh kemajuan sektor pertanian lahan kering, dan kemajuan sektor non-pertanian (karena perekonomian kota) untuk lahan persawahan. Sebagai contoh, perubahan orientasi produksi dari subsisten ke komersial, tidak menggeser dari sektor pertanian ke sektor

non-pertanian. Perluasan skop kegiatan ekonomi dari pande besi ke usaha ternak, batako press, dan perajangan kertas (kasus KPS) tidak bisa dipandang sebagai pergeseran basis ekonomi kelompok tani dari pertanian ke non-pertanian; melainkan lebih bisa dipandang sebagai proses peningkatan daya saing kelompok tani yang semula berorientasi ke dalam (pasar lokal) menjadi lebih ke luar ("pasar terbuka").

Dilihat dari pemberdayaan sektor pertanian di pedesaan, proses transformasi tersebut belum bisa dikatakan optimal. Keadaan ini bisa dimengerti jika proses itu dilihat dari perspektif campur tangan pemerintah yang dilakukan selama ini. Cara pemerintah dalam mempercepat proses transformasi pertanian di pedesaan masih bersifat searah dan san.gat sepihak. Pemerintah lebih banyak menggunakan pola otokratik ("serba kuasa"), sentralistik, sebagai "boss" pemberi bantuan, dan mengatur masyarakat petani-pedesaan dalam kerangka atau pola hubungan atas bawah (Pranadji, 1995 dan Darwin, 1991). Pembinaan dan pengembangan kelompok tani pun tidak bebas dari praktek campur tangan yang demikian. Kasus pada KSS yang pembentukannya lebih banyak dicampuri oleh kepentingan administrasi pemerintah (daripada membangkitkan kekuatan internal masyarakat pedesaan), memberikan gambaran bahwa pola campur tangan pemerintah tidak membangkitkan energi internal kelompok tani yang cukup besar. Wajar jika dalam hal ini KSS mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan situasi pasar dan gangguan lingkungan alam. Sebaliknya pada kasus KPS, yang mana campur tangan pemerintah relatif bisa dibatasi oleh kekuatan internal kelompok, transformasi ke arah peradaban ekonomi terbuka justru menunjukkan adanya kesiapan yang lebih matang.

Faktor keorganisasian usaha yang dikembangkan dalam kelompok tani masih menjadi titik lemah transformasi ekonomi pertanian di pedesaan. Sejak awal "Utopia", (istilah Utopia dimaknai sebagai "cara berpikir" untuk operasionalisasi pengaturan masyarakat yang diperkenalkan oleh Mannheim, 1991), pemerintah tampaknya condong lebih memilih untuk mengikuti gejala ("evolusi") alamiah tatanan masyarakat kapitalis. Dalam hal ini sektor pertanian dianggap sebagai sektor yang memiliki daya respon tinggi terhadap ekonomi uang dan kapital, sehingga ia tidak bisa dijadikan penggerak dan memantapkan perkembangan ekonomi. Kegiatan usaha pertanian di pedesaan lebih banyak diposisikan sebagai penghasil produk bahan mentah yang bernilai tambah rendah. Kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang jasa keuangan, perdagangan, dan pengolahan hasil pertanian lebih didorong berkembang di perkotaan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa penataan keorganisasian kegiatan ekonomi masyarakat

pedesaan lebih bisa dilihat sebagai belahan kegiatan usaha biologis (pertanian di pedesaan) yang bernilai tambah rendah dan usaha non-biologis (teknologi pengolahan dan jasa perdagangan) yang bernilai tambah tinggi (di perkotaan). Dalam hal ini kegiatan kelompok tani lebih diposisikan untuk mewakili suatu kegiatan yang bernilai tambah ekonomi rendah.

Perkembangan yang ditunjukkan KPS lebih merupakan cerminan transformasi perekonomian pertanian yang digerakkan oleh sumberdaya internal kelompok tani yang relatif bebas dari campur tangan pemerintah. Transformasi yang demikian lebih bisa dipandang sebagai transformasi masyarakat pedesaan itu sendiri, yang oleh Dumont (1971) dikatakan "transformasi pertanian adalah transformasi perekonomian masyarakat pedesaan bersangkutan". Bias tatanan organisasi ekonomi yang dikembangkan pemerintah (yang cenderung menganut "central planning economy"), baik di tingkat pusat maupun daerah, tampaknya sulit dihindari dan telah mengimbas secara tidak tertahankan pada tatanan perekonomian di pedesaan. Potensi transformasi yang seharusnya bisa secara kuat muncul dari bawah, dengan gambaran tadi, secara semena-mena menjadi terganjal oleh bias tatanan "organisasi ekonomi kota" yang dikembangkan oleh kebijaksanaan pemerintah pusat. Ada semacam gejala disempowering (Tjokrowinoto 1991) atau pengebirian, yang menekan kekuatan masyarakat pedesaan sehingga mereka mengalami kesulitan serius dalam mengaktualisasikan potensi kekuatannya.

PERKEMBANGAN DAYA SAING

Perkembangan daya saing menunjukkan kemampuan kelompok tani untuk melakukan perubahan dalam rangka memperbaiki kinerjanya, sehingga kemampuannya untuk bertahan hidup tidak mengalami penurunan yang berarti. Yang dimaksud dengan memiliki kemampuan melakukan perubahan, di dalamnya mencakup kemampuan untuk merespon atau melakukan penyesuaian din terhadap kondisi yang (biasanya) akan sering berubah. Kemampuan untuk memanfaatkan peluang (pasar) yang ada atau merealisasi suatu gagasan ideal yang beresiko ("sosial") dapat digolongkan sebagai kemampuan melakukan penyesuaian din atau peningkatan daya saing, sehingga keberadaan kelompok tani tetap bisa dipertahankan atau bahkan mengalami peningkatan kinerja ekonominya.

Dua kelompok tani yang diamati, yaitu KSS dan KPS, memberikan gambaran yang berbeda dalam perkembangan atau peningkatan daya saingnya. Secara umum

dapat dikemukakan bahwa dalam meningkatkan daya saing, KPS memiliki kemampuan yang relatif lebih tinggi dibanding KSS. Ini memberikan gambaran bahwa dengan latar belakang etnis, budaya Bali, dan SDM yang relatif sama suatu kelompok tani dapat menunjukkan perkembangan daya saing yang lebih tinggi dibanding kelompok tani lainnya. Di bawah ini akan dijelaskan tentang beberapa gambaran yang menunjukkan perbedaan perkembangan daya saing yang dimaksud.

Produk Andalan

Produk andalan dalam bentuk barang (goods) dan jasa (services), yang dikembangkan oleh kedua kelompok tani menunjukkan adanya perbedaan yang berarti. Pada awalnya KPS mengembangkan produk peralatan pertanian dan rumah tangga yang dibuat dari bahan besi bekas dan usaha ternak babi. Sementara itu KSS memusatkan pada produk andalan rumput laut. Produk andalan yang dikembangkan oleh KPS adalah produk yang sudah menjadi kegiatan anggota KPS dalam kurun waktu yang relatif lama (sejak nenek moyang mereka, dikenal sebagai empu, menekuni kegiatan pande besi); sedangkan (rumpun laut yang dikembangkan) pada KSS merupakan produk yang sama sekali baru. Pembentukan dan pengembangan KSS, yang inisiatifnya banyak dilakukan oleh aparat pemerintah (termasuk yang melalui program KPK-P4K), ini hampir bersamaan dengan dikenal dan dikembangkannya usaha rumput laut di daerah (pantai) setempat.

Produk andalan pada KPS dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup berarti. Pada awalnya (1967-1982) produk andalan KPS adalah peralatan pertanian dan rumah tangga, yang dibuat melalui usaha pande besi skala rumah tangga. Pada 1990-an produk andalan KPS tidak lagi hanya peralatan pertanian dan rumah tangga, walaupun hal itu hingga kini masih diusahakan. Ternak babi, batako press, kertas rajangan, jasa simpan pinjam, dan pelayanan sembako merupakan produk KPS yang semuanya memiliki peran sendiri dalam perkembangan usaha KPS. Saat ini kesemuanya tadi bisa dikatakan produk andalan. Jadi pada KPS tidak dikenal produk yang bersifat tunggal. Pada KSS, sejak didirikan hingga sekarang, produk andalannya masih terbatas pada (produk tunggal) rumput laut

Untuk meningkatkan produksinya, para pengrajin pande besi yang tergabung dalam KPS berusaha melakukan usaha jasa di bidang permodalan usaha. Pada tahun 1982 para pengrajin, yang sering mengalami kesulitan dalam mengadakan modal untuk membeli bahan baku besi, arang dan faktor produksi lainnya; secara perlahan dan pasti

mulai bisa diatasi. Saat itu terpikir oleh sang penggagas atau pendiri KPS (I Made Polin) untuk menghimpun dana simpanan yang diarahkan untuk mengadakan jasa simpan pinjam secara keompok. Setelah dana simpanan tadi bisa terkumpul dan usaha simpan pinjam bisa dijalankan, kesulitan para pengrajin pande besi dalam membeli sarana produksi sedikit demi sedikit mulai bisa teratasi. Usaha kelompok pande besi setempat yang tergabung dalam KPS menjadi lebih berkembang lagi.

Keberhasilan dalam pengembangan pande besi, melalui bantuan jasa simpan pinjam secara kelompok, ternyata menjadi bahan pelajaran dan pengalaman yang berharga dalam pengembangan usaha pada masa berikutnya. Pada 1989-1990, bersamaan dengan adanya program KPK-P4K yang disponsori oleh pemerintah pusat, petemak setempat membentuk kelompok ternak (babi). Dengan cara mengembangkan kelompok yang berdasar aktivitas ekonomi yang nyata, manfaat dari kelompok tani mulai semakin bisa dirasakan, terutama oleh anggota KPS. Menurut pengakuan dari petani setempat pelayanan jasa simpan pinjam telah dirasakan bisa memperbaiki kegiatan ekonomi rumah tangga.

Perkembangan produk andalan usaha KPS berikutnya semakin menunjukkan adanya perbaikan yang semakin berarti. Memasuki tahun 1995 KPS mengembangkan kelompok usaha di bidang pembuatan batako pres, membuka toko klontong, perajangan kertas (untuk paking barang-barang mudah pecah dan rusak), dan sekaligus pengembangan jasa simpan pinjam (termasuk) untuk melayani keperluan permodalan anggota masyarakat di luar kelompok. Tujuan awal dari usaha simpan pinjam ini adalah untuk mendukung kegiatan usaha anggota KPS, terutama untuk membantu pembelian input produksi. Namun sekarang telah mengarah lebih luas menjadi jasa pelayanan permodalan pedesaan yang relatif bersifat umum.

Gambaran yang berbeda ditunjukkan pada KSS, bidang usahanya hanya terfokus pada kegiatan pertanian. Produk andalan usaha kelompok hanya satu, yaitu rumput laut. Hingga saat ini KSS masih identik dengan usaha budidaya rumput laut. Dari 1995 hingga sekarang produk yang dihasilkan oleh anggota KSS tidak mengalami perubahan yang berarti. Sebagai upaya mengatasi kelangkaan modal kerja, para anggota KSS mau bekerjasama melakukan jasa simpan-pinjam yang sumber modalnya diperoleh dari bantuan KPK-P4K lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ketergantungan yang terlalu besar pada komoditi rumput laut terutama memasuki tahun 2000, ternyata menimbulkan dampak negatif yang relatif serius terhadap daya saing KSS.

Memasuki tahun 2000, usaha budidaya rumput laut mengalami gangguan alam

dan lingkungan terutama oleh serbuan ikan "liar" (sebagai makanan mereka) yang selama ini belum pernah dialami. Pada saat hantaman ombak di pantai masih relatif besar, jala pelindung rumput laut untuk menghalangi serbuan ikan liar nyaris tak berfungsi. Keberadaan jenis ikan tertentu dalam jumlah besar yang mulai sangat menyukai rumput laut setempat menjadi ancaman serius usaha budidaya rumput laut yang dilakukan oleh anggota KSS. Pada saat gelombang laut relatif besar, tanaman rumput laut tidak terjaga dengan baik, dan ikan-ikan yang senang dengan rumput laut tadi seakan-akan memperoleh "durian runtuh" atau makanan gratis yang melimpah, pada saat itu pula bahaya besar mulai mengintip kehidupan anggota KSS. Akhir-akhir ini situasi usaha budidaya rumput laut mengalami penurunan drastis, terutama sejak 7 bulan terakhir. Pada kondisi demikian (produk tunggal), kemampuan kelompok untuk bisa mengatasi gangguan ikan liar tadi masih jauh dari memadai. Oleh sebab itu, keuntungan rumah tangga anggota KSS yang berasal dari upaya mengelola rumput laut saat ini hampir semuanya mengalami penurunan ("kerugian") yang relatif besar.

Peningkatan produksi rumput laut selama lima tahun terakhir belum dapat dipandang sebagai peningkatan daya saing kelompok tani yang nyata. Sebab peningkatan tadi lebih banyak disebabkan dari kuatnya tarikan pasar luar negeri, dan bukan oleh kuatnya manajemen dan kinerja KSS dalam menembus pasar ekspor di negara Eropa. Kasus penurunan produksi pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan KSS dalam mengusahakan rumput laut relatif masih jauh dari memadai. Jika dikatakan telah terjadi peningkatan daya saing kelompok hanya dengan melihat perkembangan nilai ekonomi yang-dihasilkannya, hal itu dinilai masih bersifat temporer dan semu. Sementara itu produk melalui pengembangan kerajinan rumah tangga yang seharusnya bisa dikembangkan melalui usaha kelompok ini, ternyata belum juga bisa diwujudkan.

Jangkauan Pelayanan

Perkembangan jangkauan pelayanan yang bisa dicapai oleh KPS dapat dinilai relatif besar. Pada awal dikembangkannya KSS, jumlah anggota yang dilayani hanya mencapai sekitar 50 unit kepala keluarga. Saat ini perkembangannya sudah mencapai sekitar 200 kepala keluarga. Jumlah kelompok yang dilayani oleh kelompok induk (KPS) yang sekarang ini sudah menjadi badan usaha koperasi, meliputi 7 kelompok tani. Tiga kelompok tani wanita dan 4 kelompok tani pria. Walaupun peningkatannya tampak signifikan, terutama pada KPS, namun potensi kekuatan untuk bias berkembang lebih

besar tampaknya sangat berat. Dihadapkan pada tuntutan untuk masuk di arena pasar terbuka, kekuatan KPS ini masih seperti kekuatan "mesin bemo" yang harus berpacu di jalan tol.

Gejala peningkatan pelayanan KSS terhadap anggota petani rumput laut secara fisik juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Namun jika dilihat dari pelayanan jasa ekonomi, misalnya untuk penyediaan saprodi usaha rumput laut, akhir-akhir ini tidak menunjukkan peningkatan. Dengan adanya gangguan alam pada usaha rumput laut, yang cara mengatasinya belum ditemukan, maka tidak ada pelayanan jasa permodalan yang bisa dijalankan oleh KSS. Sementara itu cabang usaha lain, selain berburuh kasar dan memelihara ternak di daerah setempat belum didapatkan, Semua aktivitas ekonomi kelompok sekan-akan terhenti dengan terhentinya sistem produksi rumput laut. Jadi bisa dikatakan bahwa kemampuan atau kinerja ekonomi KSS dalam mengatasi gangguan sistem produksi rumput laut ini, terutama oleh ikan liar masih relatif sangat lemah.

Jika dilihat dari jangkauan pemasarannya, KSS menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat berarti. Dalam waktu kurang dari 5 tahun sudah bisa memasuki pasar negara-negara Eropa. Selain diekspor ke negara-negara di Eropa, hasil rumput laut anggota KSS belum mempunyai alternatif pasar lain. Hanya saja, dilihat dari segi kualitas atau bentuk yang dipasarkan hampir semuanya masih berupa semacam bahan mentah. Walaupun sudah dalam bentuk rumput laut kering, namun diperkirakan nilai tambah ekonominya masih jauh dari maksimal. Produk rumput laut yang diekspor tadi tampaknya hampir tidak mengalami proses peningkatan nilai tambah yang berarti. Padahal secara tekno-ekonomi, pemanfaatan rumput laut untuk berbagai produk bernilai tambah ekonomi tinggi masih sangat terbuka.

Dengan hanya mengandalkan saluran pemasaran ekspor yang bersifat tunggal dan cenderung oligopsinistik, sistem usaha atau produksi rumput laut yang dikelola KSS menjadi sangat rentan terhadap gangguan pasar dan ulah pedagang besar atau eksportir. Hingga kini, penyaluran hasil untuk memenuhi pasar lokal atau domestik masih sangat kecil. Padahal Bali merupakan daerah turis, yang hal itu berarti cukup potensial untuk pemasaran produk rumput laut. Agak beruntung hingga saat ini gangguan pasar yang dimaksud belum muncul. Walaupun demikian, mengingat masih memanfaatkan saluran pasar tunggal, pemikiran ke arah perluasan alternatif pasar di masa datang, terutama pasar domestik dan regional, perlu dipertimbangkan serius.

Jangkauan pemasaran produk yang dihasilkan anggota KPS relatif bervariasi. Sebagai contoh, produk ternak babi dipasarkan hingga melewati batas provinsi.

Sedangkan produk pande besi, kertas rajangan, dan batako press hanya terbatas pada pasar lokal (provinsi). Namun jika ditinjau jumlah penduduk yang dilayani oleh kegiatan KPS, maka jangkauan pelayanan KPS ini bisa dikatakan sudah relatif besar. Kekuatan KPS dalam menembus pasar relatif besar, dan perkembangannya relatif tidak berubah. Karena itu pula, dengan sistem manajemen kelompok yang sehat, hampir semua cabang usaha yang dikelola KPS ini menunjukkan perkembangan yang sehat pula.

Peningkatan Aset, Saham, dan Pelayanan

Nilai aset KPS pada awalnya (1982) hanya Rp 250 ribu, dengan jumlah anggota 50 kepala keluarga. Aset ini berasal dari simpanan anggota yang berjumlah 50 kk, yang masing-masing kk menyetor pada KPS sebesar Rp 5 ribu. Selang sekitar 17 tahun setelah itu, nilai aset KPS telah mencapai Rp 1,3 milyar, termasuk di antaranya bangunan dan kekayaan anggota yang berupa simpanan dan saham. Pada KSS gambarannya agak berbeda. Nilai aset KSS tidak dapat diperoleh data yang jelas. Namun jika ditaksir, nilai aset KSS saat ini tidak akan mencapai Rp 50 juta. KSS ini belum memiliki tempat kerja permanen. Tempat dan bangunan untuk sekretariat kelompok dan aktivitas usahanya sehari-hari statusnya masih menyewa. Aset KSS dalam bentuk uang sebagian besar masih berupa simpanan anggota, yang dahulu diawali oleh program P4K.

Rata-rata pemilikan saham saat ini pada KPS mencapai Rp 2 juta per KK anggota. Pada saat awal saham mereka dalam usaha KPS hanya dalam bentuk simpanan, yaitu sebesar Rp 5 ribu per kk. Dilihat dari angka ini, perkembangan daya saing KPS bisa dikatakan relatif bagus, dan gambaran ini hampir tidak terlihat pada KSS. Jika perkembangannya tidak terganggu, kemampuan KPS dalam meningkatkan aset usaha diperkirakan akan terus meningkat walaupun masih dalam suasana krisis ekonomi. Dari segi tatanan organisasi ekonomi jika organisasi kelompok tani tidak diperbaiki, maka kelompok tani semacam ini harus lebih sigap dan lentur dalam melakukan penyesuaian diri.

Sebagian besar keuntungan usaha yang diperoleh setiap tahun digunakan atau dikembalikan sebagai pemupukan modal, dengan demikian jumlah aset KPS terus meningkat. Keuntungan bersih usaha yang dibagikan pada anggota tetap ada tetap ada, yang pada tahun 1999 besarnya sekitar Rp 18 juta (rata-rata Rp 90 ribu per kk). Namun demikian angka keuntungan bersih itu bukan menggambarkan besarnya keseluruhan manfaat yang bisa dinikmati anggota. Karena pada dasarnya setiap anggota mempunyai

usaha sendiri, maka keuntungan langsung yang diterima anggota nilainya jauh lebih tinggi dari Rp 90 ribu per kk per tahun.

Pada KSS antara 1995-1999 merasakan adanya keuntungan yang terus meningkat. Lebih-lebih pada saat nilai US \$ meningkat drastis terhadap rupiah (dari sekitar Rp 2500,- menjadi Rp 9000,- per US \$ 1,-), pendapatan petani rumput laut dalam bentuk rupiah juga ikut meningkat drastis. Namun peningkatan ini tidak mencerminkan suatu peningkatan daya saing KSS yang riil. Karena peningkatan keuntungan anggota KSS lebih banyak ditentukan oleh faktor luar (pasar ekspor dan harga dalam bentuk US \$) dan kemurahan alam. Begitu terjadi gangguan terhadap (misalnya) kemurahan alam, sistem produksi rumput laut tadi terguncang hebat, dan produksi rumput laut nyaris musnah. (Suatu kali bisa terjadi faktor pasar yang akan mengguncang kinerja KSS ini).

Keuntungan lain yang bisa dinikmati oleh anggota KPS adalah pelayanan dalam bentuk jasa simpan pinjam, sebagai kemudahan dalam permodalan usaha (dengan tingkat bunga 2,5 persen per bulan; jika bukan anggota dikenai tingkat bunga 3 persen per bulan) dan pelayanan penyediaan kebutuhan sehari-hari (seperti sabun cuci, beras, pakan ternak, dan lainnya). Pada KSS tingkat kemampuan pelayanannya pada anggota masih sangat terbatas, terutama pada penyediaan saprodi usaha rumput laut dan pembayaran sembako secara kredit. Keadaan ini bisa diterima, sebab kondisi keuangan KSS masih sangat terbatas.

FAKTOR DINAMIKA DAYA SAING

Di muka telah disebutkan bahwa dari dua kelompok tani yang diamati, KSS dan KPS, menunjukkan gambaran yang berbeda terutama dilihat dari perkembangan daya saingnya. Dalam rangka membangkitkan daya saing kelompok, ada beberapa faktor budaya material dan sosio-budaya yang berperan cukup besar. Dari segi budaya material, daya saing tadi ditentukan oleh faktor-faktor, seperti teknologi, penguasaan lembaga jasa permodalan, dan pengetahuan teknik produksi. Sedangkan untuk faktor sosio-budaya yang bisa diinfentarisir adalah orientasi kegiatan kelompok, kepemimpinan dan legitimasi adat, manajemen kelompok, organisasi produksi, dan kepatuhan terhadap tata nilai kolektif yang telah disepakati.

Teknologi dan Pengetahuan Teknik Produksi

Penguasaan teknologi dan pengetahuan teknik produksi merupakan dua faktor dari sekian faktor kunci yang menentukan daya saing usaha atau kelompok tani. Kedua

faktor ini sangat dirasakan menjadi penghambat peningkatan daya saing kelompok tani, terutama pada KSS. Hancurnya sistem produksi rumput laut akibat gangguan alam menunjukkan bahwa pengetahuan petani setempat dalam usaha rumput laut relatif masih sangat terbatas. Jika pengetahuan untuk mengatasi gangguan ikan liar pada usaha budidaya rumput laut telah dikuasai petani, kemungkinan petani menderita akibat kehancuran produksi tidak akan sedrastis seperti saat ini.

Agak disayangkan bahwa pembinaan kelompok tani (KSS) yang dilakukan oleh instansi pemerintah, termasuk oleh lembaga yang menangani proyek KPK-P4K masih terfokus pada aspek fisik pengembangan kelompok tani. Mereka ini masih kurang sekali memperhitungkan aspek teknik dan pengetahuan produksi yang mendukung pengembangan usaha ekonomi atau yang menjadi inti usaha kelompok tani. Fakta di lapangan terlihat dengan jelas bahwa penguasaan teknologi dan pengetahuan teknik produksi rumput laut sangat menentukan pembentukan daya saing kelompok tani. Tenaga ahli di bidang budidaya rumput laut diperkirakan bisa ditemukan, termasuk di Provinsi Bali. Hanya saja, tampaknya tim pembina KPK-P4K belum menganggap hal itu sebagai sesuatu yang mendesak.

Indikasi kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan teknik produksi ini juga dirasakan pada KPS. Hal ini menonjol pada kelompok petani yang mengusahakan temak babi. Saat ini yang dihadapi peternak babi adalah inefisiensi. Dengan harga pakan yang meningkat lumayan besar usaha temak babi menjadi sulit mencari keuntungan. Penguasaan pengetahuan tentang pakan yang bermutu tinggi dengan harga yang relatif murah menjadi kendala produksi temak babi setempat, padahal jika ditinjau dari potensi pasarnya relatif besar.

Pelayanan Permodalan dan Resiko Produksi

Permodalan dan kemampuan menanggung resiko produksi masih menjadi faktor pembatas serius kegiatan pengembangan usaha kelompok tani. Walaupun usaha ekonomi pada KPS telah berkembang relatif maju, namun jasa permodalan yang relatif murah dan kemudahan lain untuk mengatasi resiko produksi ("asuransi") masih menjadi sesuatu yang langka. Jasa permodalan yang ditawarkan pada kelompok tani umumnya tidak berbeda dengan yang ditawarkan pada pelaku bisnis lainnya, termasuk yang berskala besar. Dalam kondisi demikian, harga (pinjaman) modal yang harus dibayar oleh masyarakat peminjam di pedesaan ("petani") akan relatif tinggi, dan hal ini akan menimbulkan daya saing usaha yang dijalankan kelompok tani.

Usaha yang dikembangkan oleh KPS dan KSS merupakan usaha kecil dan rumah tangga, dan langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak di pedesaan. Dengan tidak adanya perhatian yang agak khusus pada mereka terutama dari segi kemudahan memperoleh jasa pelayanan permodalan dan resiko produksi, usaha yang dikembangkan oleh kedua kelompok ini secara abadi akan berhadapan dengan kehancuran. Kemampuan mereka dalam memutar aset permodalan tampaknya tidak mengecewakan, dan jarang sekali didapati anggota kelompok baik pada KSS maupun KPS, yang secara sengaja melakukan kecurangan dalam berhutang pada kelompoknya.

Jasa permodalan yang tersedia saat ini umumnya dari lembaga perbankan. Jika mereka meminjam dengan tingkat bunga di atas 2 persen per bulan pada lembaga perbankan, sudah barang tentu kelompok tani tadi akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan dan menagih pada petani. Bunga pinjaman yang harus dibayar petani akan relatif tinggi. Dengan memperhatikan faktor resiko produksi dan biaya manajemen kelompok, maka tingkat bunga yang ditawarkan pada anggota kelompok atau petani setempat bisa mencapai di atas 3,5 persen per bulan, suatu tingkat bunga usaha pertanian yang sulit diterima akal sehat.

Orientasi Kegiatan

Kedua kelompok mempunyai akar budaya Bali yang kuat, yang mana hal itu sangat mewarnai orientasi kegiatan ekonomi kelompok. Walaupun mencari keuntungan ekonomi tetap penting, tampaknya mencari keuntungan ekonomi bukan satu-satunya - tujuan aktivitas kelompok. Selama 7 bulan terakhir, kegiatan KSS hampir tidak menghasilkan keuntungan ekonomi sama sekali. Malahan saat ini pengurus KSS harus memutar otak agar kesejahteraan anggotanya bisa terpenuhi sebelum kegiatan ekonomi ini usaha rumput laut bisa dijalankan. Norma budaya Bali yang menjunjung tinggi solidaritas sosial sangat kental mewarnai pengelolaan kelompok tani.

Kenyamanan dan keamanan memperoleh kebutuhan dasar atau basic need anggota kelompok menjadi prioritas orientasi kegiatan kelompok. Tidak ada kekhawatiran yang ekstrim para pengurus kelompok terhadap dedikasi anggotanya. Jika usaha rumput laut membaik, pada kasus KSS, pengurus yakin semua tagihan hutang anggota kelompok akan terlunasi. Bahkan dalam beberapa kasus, pelunasan hutang tidak diambil dari hasil usaha rumput laut. Ini menunjukkan bahwa energi sosial masyarakat Bali untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ekonomi berkelompok relatif tinggi, terlepas apakah hal itu akan memperoleh bantuan pemerintah atau tidak.

Pada kasus KPS gambarannya tidak berbeda jauh. Hanya saja hubungan antara orientasi sosial dan ekonomi sudah lama terbentuk dengan harmonis. Proses penyesuaian terhadap guncangan keadaan ekonomi relatif bisa diredam oleh KPS dari pada KSS. Pengalaman yang relatif lebih lama pada pengelolaan KPS di bidang usaha ekonomi memberikan keyakinan dan kemampuan untuk lebih tegar dan antisipatif terhadap situasi yang kurang menguntungkan.

Kepemimpinan dan Legitimasi Adat

Kehidupan masyarakat Bali sangat kental diwarnai oleh adat, di mana adat tadi berakar pada tradisi kepercayaan Hindu-Bali. Yang disebut pemimpin oleh masyarakat Bali adalah orang yang memiliki kredibilitas di bidang keagamaan. Orang demikian biasanya memiliki keunggulan di bidang pengetahuan, sifat bijaksana, tegas, adil, dan bisa dipercaya. Seseorang berhak disebut pemimpin jika bisa memberikan pancaran keunggulannya tadi pada masyarakat sekitar. Penunjukkan Ketua atau Pemimpin Kelompok (Tani) tidak dapat dilepaskan dari legitimasi adat. Oleh sebab itu, seorang ketua kelompok adalah juga tokoh yang dihormati oleh masyarakat setempat. Jika pengetahuan teknis pemimpin tersebut di bidang produksi relatif kurang, maka akan dicarikan "tokoh" pendamping yang lebih muda untuk mengisi kekosongan kemampuannya.

Jarang ditemui pada masyarakat pedesaan Bali bahwa seorang pemimpin memperoleh perlakuan kasar dari anggotanya. Hal ini bisa dimengerti, karena sebelum seseorang dipilih menjadi pemimpin ia telah mengalami proses pengamatan, penilaian dan pengujian yang cukup lama. Pada saat dilakukan pemilihan, untuk penunjukkan seorang ketua atau pemimpin, proses yang dilalui biasanya tidaklah terlalu rumit, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk memadukan perbedaan kepentingan antar pemimpin dan pengikutnya. Di masyarakat pada kedua kelompok tidak dijumpai semacam pemimpin "karbitan" atau didrop dari atas. Dalam banyak hal pemimpin tadi juga berperan sebagai solidarity maker, penegak peraturan (awig-awig) dan inspirator bagi anggota yang dipimpinnya ke arah mencapai tujuan kehidupan (ekonomi) yang lebih baik.

Manajemen Kelompok

Gejala menarik yang ditemui pada kedua kelompok, bahwa aspek manajemen modern telah diterapkan dengan baik. Pengambilan keputusan dalam kelompok

dilakukan melalui sistem musyawarah yang bermutu tinggi, dan harus dihadiri oleh semua anggota kelompok (kecuali yang tidak hadir memberikan alasan yang kuat dan bisa diterima oleh semua anggota kelompok). Mengingat cara pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sangat terbuka (transparan), bisa dipertanggung jawabkan (accountable) dan demokratis; hal itu mempunyai kekuatan yang mengikat pada setiap anggota kelompok.

Pada pertemuan kelompok tani, pengurus biasanya bersifat terbuka untuk menampung berbagai pendapat, termasuk kritik dan keluhan anggota kelompok. Dalam acara pertemuan seperti itu, umumnya para anggota kelompok tani merasa memperoleh kesempatan yang baik untuk mengemukakan uneg-uneg dan permasalahannya. Dengan daya empati yang relatif tinggi antar anggota kelompok, maka prinsip rasionalitas dalam pengelolaan kelompok menjadi mengemuka dengan sendirinya. Bisa dikatakan bahwa spirit rasionalitas sangat kuat mewarnai setiap keputusan kelompok. Dari kasus ini dapat dikatakan bahwa, dalam sistem pengambilan keputusan (kolektif), masyarakat pedesaan Bali menggunakan prinsip rasionalitas tinggi, dan sekaligus tidak membenturkan dan mengaburkan prinsip tadi dengan kehidupan kolektivitasnya.

Sistem Organisasi Produksi

Sistem organisasi produksi merupakan titik lemah pengembangan daya saing kelompok, baik pada KSS maupun KPS. Sistem organisasi produksi yang dianut oleh KSS, misalnya, masih mengikuti organisasi pertanian yang sangat konvensional. Penguasaan usaha hanya terjadi pada sektor hulu, dan sektor hilirnya dikuasai oleh pelaku ekonomi di luar desa. Hal ini secara sistematis berarti memberikan peluang munculnya gejala inefisiensi di tingkat usaha kelompok. Sebab nilai tambah ekonomi yang relatif besar umumnya diperoleh dari usaha pengolahan dan jasa pemasaran. Selama dua kegiatan ini tidak dikuasai oleh sistem organisasi usaha yang dikelola kelompok maka, maka nilai tambah ekonomi yang relatif tinggi tadi tidak jatuh pada petani atau anggota kelompok.

Kepatuhan Terhadap Tata-nilai Kolektif

Di muka telah dikemukakan bahwa kehidupan kolektif telah menjadi norma kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan Bali, terutama pada masyarakat di kedua kelompok tani yang diamati. Kepatuhan terhadap tata-nilai kolektif ini menjadi inti kekuatan kelompok tani, dan bukan hanya pada teknologi, permodalan dan bantuan

atau, belas kasihan pemerintah. Suatu kelompok tani tetap bisa bertahan, kasus KSS, walaupun kegiatan ekonominya mengalami masalah serius, hal itu disebabkan oleh adanya tata-nilai kolektif (awig-awig) yang relatif dipegang teguh petani. Mereka tidak anti bantuan pemerintah, masuknya teknologi baru, atau kapital; namun mereka ingin menempatkan semua ini dalam bingkai pengembangan kehidupan kolektif.

Kasus pada KPS menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat setempat, dan sudah barang tentu dipandu oleh pemimpinnya menjadi energi utama pengembangan kelompok tani. Dengan inisiatif pemimpinnya, walaupun tanpa mendapat bantuan dari pemerintah pusat, mereka bisa membangun suatu kelompok tani yang sangat solid. Bahkan kelompok tani seperti KPS sudah bisa disebut sebagai koperasi. Hanya saja jaman dulu mereka mengalami kesulitan jika harus mengurus badan hukumnya. Faktor bantuan keuangan dari pemerintah, penguasaan teknologi, dan kapital secara nyata memang ikut membesarkan kelompok ini. Namun perlu dikemukakan bahwa bantuan itu muncul setelah kelompok ini terbentuk dan berjalan sehat, bukan pada saat pembentukannya. Oleh sebab itu dapat dikemukakan bahwa keberadaan dan berkembangnya kelompok tadi bukan disebabkan bantuan pemerintah. Agak disayangkan bahwa hal semacam ini masih kurang disadari oleh petugas pemerintah di daerah maupun pusat.

KESIMPULAN DAN SARAN

- (1) Kekuatan masyarakat pedesaan Bali terletak pada lembaga Banjar Adat. Namun dilihat dari keorganisasian ekonominya, kegiatan kelompok tani menjadi bagian kepanjangan dari lembaga adat. Kemandirian kelompok tani sangat ditentukan oleh dukungan kekuatan "arus bawah", terutama yang berakar pada adat dan tradisi setempat. Kelompok tani yang didukung "arus bawah" bisa dijadikan sebagai basis pembentukan dan pengembangan keorganisasian usaha yang dapat diandalkan daya saingnya.
- (2) Pembentukan kelompok tani yang terialu mementingkan pada basis produksi atau komoditi dan kurang memperhatikan khasanah budaya setempat, seperti kasus KSS, ternyata tidak menghasilkan kinerja dan perkembangan daya saing yang menggembirakan. Yang menjadikan sebagai suatu kekuatan, yang menyebabkan suatu kelompok tani tidak mudah hancur, walaupun kegiatan ekonomi yang menopang kelompok tersebut sedang menghadapi masalah serius, adalah pada kepatuhan masyarakat terhadap tata-nilai kehidupan kolektif yang berakar pada adat

dan kepercayaan setempat.

- (3) Orientasi ekonomi, pilihan komoditi, penguasaan teknologi dan pengetahuan teknik produksi memang merupakan aspek penting dalam pengembangan daya saing kelompok. Namun tetap saja perlu disadari bahwa orientasi ekonomi tadi harus dibingkai dengan tatanan dan budaya masyarakat setempat yang lebih sehat, karena pengembangan kelompok tani sebagai basis kegiatan ekonomi tidak bisa begitu saja atau semata-mata mencangkokkan budaya material dari luar desa ke dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Aspek manajemen, tata-nilai harmoni ("moral") setempat, dan kepemimpinan yang bisa dipercaya dan diterima secara "modern" harus menjadi bagian penting dari dinamika dan kekuatan utama kelompok tani.
- (4) Pengembangan kelompok tani yang dimaksud bukan sekedar mentransformasikan tatanan ekonomi tradisional ke arah yang lebih modern, namun juga yang lebih penting mentransformasikan semua elemen sosial dan budaya setempat untuk menjadi basis kekuatan ekonomi. Dengan basis dan pemberdayaan semua elemen sosio-budaya setempat diharapkan perkembangan kelompok tani akan lebih sehat dan berkelanjutan. Lebih dari itu, kemampuan kelompok tani untuk secara cepat dan lugas melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan bisa dilakukan dengan lebih mulus dan antisipatif. Energi utama dinamika daya saing kelompok tani haruslah dari dalam kelompok tani itu sendiri. Faktor eksternal, seperti kebijakan dan bantuan pemerintah, walaupun tetap penting, harus dianggap sebagai pelengkap saja.
- (5) Pengaruh pemimpin dan kepemimpinan sangat besar terhadap perkembangan daya saing kelompok tani. Tampaknya seorang pemimpin tidak cukup hanya sebagai *solidarity maker* atau penjaga tata-nilai kolektif setempat; namun juga harus bisa sebagai *obor penerang* ke arah kemajuan. Kasus pada KPS memberikan gambaran yang cukup tajam tentang besarnya pengaruh pemimpin yang kuat dalam visi pengembangan ekonomi kelompok tani. Yang menarik di sini adalah kemampuan pemimpin tadi menjadikan kekuatan adat dan budaya setempat sebagai basis pengembangan kelompok tani dan kegiatan ekonomi yang modern dan berdaya saing relatif tinggi.
- (6) Dilihat dari segi organisasi produksi, kedua kelompok tani belum menunjukkan adanya terobosan kemajuan yang berarti. Sistem organisasi produksi masih mengikuti tradisi organisasi pertanian, di mana ada pemisahan yang tegas antara sistem usaha yang menangani produksi bahan mentah atau bernilai tambah rendah

di satu sisi, dan yang menangani usaha pengolahan dan jasa pemasaran yang bernilai tambah tinggi di sisi lain. Sistem ini mengurangi insentif kelompok tani untuk mengembangkan diri secara lebih maju lagi, sehingga peluang kelompok tani untuk berperan dalam pengembangan perekonomian pedesaan menjadi tidak maksimal.

(7) Pada kondisi saat ini, jika pengembangan kelompok tani diarahkan sebagai basis pengembangan keorganisasian ekonomi pedesaan, maka ada beberapa hal penting yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain:

- a. Pemecahan masalah jasa keuangan dan permodalan di pedesaan sangat mendesak. Pemerintah harus bisa menciptakan kondisi pelayanan jasa permodalan yang sesuai dengan karakter sistem produksi pertanian dan ekonomi pedesaan. Adaiyah sangat ironis dan sangat tidak kompatibel, mengingat sebagian besar kehidupan ekonomi masyarakat berciri agraris, jika konsep pelayanan lembaga semacam perbankan menggunakan pendekatan industrial dan model bisnis perkotaan.
- b. Strategi investasi dalam bentuk peningkatan prasarana ekonomi pedesaan tampaknya masih agak kedodoran, sehingga biaya over head kegiatan ekonomi pedesaan yang ditanggung masyarakat pedesaan terialu tinggi. Sudah barang tentu hal ini menjadi pukulan serius bagi peningkatan daya saing kelompok tani di pedesaan.
- c. Tingkat pengetahuan masyarakat pedesaan di bidang teknik perproduksi ke arah untuk menghasilkan produk akhir (bernilai tambah tinggi) yang berdaya saing tinggi di pasaran (termasuk ekspor) masih sangat lemah; dan hal itu harus menjadi perhatian serius dan menjadi bagian investasi pemerintah jangka panjang.
- d. Sistem organisasi usaha kita, termasuk di sektor pertanian, masih sangat bias pemihakannya pada kegiatan industri dan jasa pemasaran. Saat ini merupakan saat yang tepat untuk merealisasi slogan pemihakan pada perekonomian kerakyatan atau masyarakat pedesaan. Upaya merealisasikan dan menata kembali keorganisasian usaha pertanian di pedesaan yang kuat menjadi hal yang sangat mendesak. Kegiatan industri, jasa pemasaran dan keuangan haruslah menjadi bagian penting dan tidak terpisah dari perekonomian desa.
- e. Salah satu strateginya bahwa dengan bentuk organisasi usaha atau ekonomi

pedesaan yang baru tadi harus membuka kemungkinan yang luas bahwa output usaha pertanian (dan juga non-pertanian) yang keluar dari pedesaan haruslah yang sudah memperoleh proses nilai tambah tuntas. Dengan demikian output usaha ekonomi di pedesaan merupakan produk akhir, dan sebagian besar nilai tambahnya kembali ke pedesaan.

- (8) Strategi keorganisasian ekonomi penting lainnya yang harus ditempuh adalah melakukan langkah-langkah sistematis agar masyarakat pedesaan tidak hanya bisa berkontribusi melalui tenaga kerja, melainkan secara kolektif bisa memiliki andil dalam jaringan permodalan usaha pada seluruh kegiatan ekonomi di Bali. Sumberdaya lahan, budaya setempat, kekayaan pengetahuan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus dinilai sebagai aset strategis masyarakat pedesaan Bali. Secara kolektif masyarakat pedesaan memiliki sumbangan besar terhadap kemajuan ekonomi Bali dan perkembangan pariwisata di Indonesia dan mereka berhak mendapat kompensasi dalam bentuk saham kerja atau modal.

DAFTAR BACAAN

- Anonimous. 2000. Pengembangan Kelompok Tani Sebagai Basis Kegiatan Ekonomi Pedesaan. Pusat Pengkajian Sumberdaya Manusia Pertanian (SDM), Badan Pengembangan SDM dan Penyuluhan Pertanian. Jakarta.
- Darwin, M. 1991. Sistem Administrasi untuk Pembangunan Kualitas Manusia. dalam Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Kasus (Ed. Samodra Wibawa). P.T. Tiara Wacana Yogya. Jogjakarta.
- Dumont, R. 1971. Agriculture as Man's Transformation of the Rural Environment. in *Peasants and Peasant Societies* (ed. By T. Shanin). Penguin Book Inc. Middlesex.
- Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kozminski, A.K. 1990. Market and State in Centrally Planned Economies, in *Economy and Society: Overviews in Economic Sociology* (Edited by Alberto Martinelli and Niels J. Smelser). *Current Sociology: The Journal of the International Sociology Association*, 38(2/3):133-155. Sage Publication. London.
- Mannheim, K. 1991. Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan antara Pikiran dan Politik. Penerbit Kanisius. Jakarta.

- Polanyi, K. 1957. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*. Beacon Press. Boston.
- Pranadji, T., B. Rahman, F. Sulaiman, Saptana dan T.B. Purwantini. 1999. *Analisis Kebijakan Pengembangan Koperasi Pertanian yang Berwawasan Agribisnis*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pranadji, T. 1995. *Wirausaha, Kemitraan dan Pengembangan Agribisnis Secara Berkelanjutan*. Analisis CSIS, XIV(5):332-343. Center for Strategic and International Studies. Jakarta.
- Pranadji, T. 1998. *Modernisasi, Krisis Ekologi, dan Ketimpangan*. Sosial: Kajian dari Perspektif Pembangunan Berkelanjutan pada Desa-desa Nelayan di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. *Mimbar Sosek: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 11(2):32-51, 1988. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. LP3ES. Jakarta.
- Tjokrowinoto, M. 1993. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. dalam *Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Kasus*. PT Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta.